

**PENGARUH LABA BUMD, DANA ALOKASI UMUM DAN  
JUMLAH UMKM TERHADAP BELANJA MODAL DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**FERDI YULISTIAN ANWAR**

**1910011111030**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)*

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH LABA BUMD, DANA ALOKASI UMUM DAN JUMLAH UMKM  
TERHADAP BELANJA MODAL DI INDONESIA**

Oleh

Nama : FERDI YULISTIAN ANWAR  
NPM : 1910011111030

Tim Penguji

Ketua

(Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si)

Sekretaris

(Kasman Karimi, S.E., M.Si)

Anggota

(Nurul Huda, S.E., M.Si)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tanggal 8 Maret 2024

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bung Hatta

Dekan



(Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si)

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR TEKSTIL DAN  
PRODUK TEKSTIL DI INDONESIA**

Oleh

Nama : NURUL ILZA HARDANI  
NPM : 1910011111006

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 20 Februari 2024

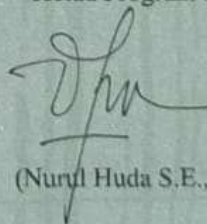
Menyetujui

Pembimbing



(Dr. Alvis Rozani S.E., M.Si)

Ketua Program Studi



(Nurul Huda S.E., M.Si)

## LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferdi Yulistian Anwar  
NPM : 1910011111030  
Program Studi : Strata Satu (S1)  
Prodi : Ekonomi Pembangunan  
Judul Skripsi : Pengaruh Laba BUMD, Dana Alokasi Umum  
Dan Jumlah UMKM Terhadap Belanja Modal  
Di Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, ini bukan merupakan jiplakan, salinan atau sejenisnya dari skripsi atau karya tulis orang lain, lembaga perguruan tinggi atau lembaga manapun yang dipublikasikan dalam media elektronik atau cetak kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 8 Maret  
2024 Penulis



**Ferdi Yulistian Anwar**  
**1910011111030**

# **PENGARUH LABA BUMD, DANA ALOKASI UMUM DAN JUMLAH UMKM TERHADAP BELANJA MODAL DI INDONESIA**

**Ferdi Yulistian Anwar<sup>1</sup>, Erni Febrina Harahap<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta, <sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas BungHatta

[ferdiyulistian401@gmail.com](mailto:ferdiyulistian401@gmail.com), [erni\\_fh@yahoo.com](mailto:erni_fh@yahoo.com)

## *Abstract*

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh laba BUMD, Dana alokasi umum dan Jumlah UMKM Terhadap Belanja Modal di Indonesia di 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi data panel selama tahun 2017-2021 di 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara laba BUMD, Dana alokasi umum terhadap belanja modal di 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan Jumlah UMKM memiliki hubungan negatif terhadap belanja modal.

**Kata Kunci:** Laba BUMD, DAU, Jumlah UMKM, Belanja Modal

# ***THE INFLUENCE OF BUMD PROFITS, GENERAL ALLOCATION FUNDS AND THE NUMBER OF MSMEs ON CAPITAL EXPENDITURES IN INDONESIA***

**Ferdi Yulistian Anwar<sup>1</sup>, Erni Febrina Harahap<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta, <sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas BungHatta

[ferdiyulistian401@gmail.com](mailto:ferdiyulistian401@gmail.com), [erni\\_fh@yahoo.com](mailto:erni_fh@yahoo.com)

## ***Abstract***

*Capital expenditures are expenditures whose benefits tend to exceed one year and will increase government assets or wealth, which will then increase the routine budget for operational costs and maintenance costs. This research aims to determine the influence of BUMD profits, general allocation funds and the number of MSMEs on capital expenditure in Indonesia in 34 provinces in Indonesia. This research uses panel data regression during 2017-2021 in 34 provinces in Indonesia. This research shows that there is a positive relationship between BUMD profits, general allocation funds and capital expenditure in 34 provinces in Indonesia. Meanwhile, the number of MSMEs has a negative relationship with capital expenditure.*

**Keywords:** BUMD profits, DAU, number of MSMEs, capital expenditure

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB 1.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II.....</b>	<b>13</b>
<b>TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 Belanja Modal.....	13
2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal.....	16
2.1.3 Laba Badan Usaha Milik Daerah .....	17
2.1.4 Peranan BUMD .....	17
2.1.5 Tujuan dan Manfaat BUMD .....	19
2.1.6 Dana Alokasi Umum.....	20
2.1.7 Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah.....	23
2.1.8 Peran UMKM .....	25
2.1.9 Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah.....	26
2.1.10 Kekuatan dan Kelemahan UMKM .....	27
2.2 Penelitian Terdahulu .....	31
2.3 Pengaruh Antar Variabel.....	41
2.3.1 Pengaruh Laba Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Belanja Modal.....	41
2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal .....	41
2.3.3 Pengaruh Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Belanja Modal.....	42
2.4 Kerangka Konseptual.....	43
2.5 Hipotesis Penelitian .....	44

<b>BAB III.....</b>	<b>45</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	45
3.2 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	45
3.2.1 Belanja Modal (Y) .....	45
3.2.2 Laba Badan Usaha Milik Daerah .....	45
3.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU) .....	46
3.2.4 Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah .....	46
3.3 Uji Asumsi Klasik .....	46
3.4 Estimasi Model Data Panel.....	48
3.5 Uji Untuk Menentukan Efect Regresi Panel .....	50
3.7 Uji Statistik.....	54
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM VARIABEL .....</b>	<b>57</b>
4.1 Perkembangan Kondisi Belanja modal di 34 provinsi di indonesia.....	57
4.2 Perkembangan Kondis Laba BUMD 34 Provinsi Di Indonesia .....	60
4.3 Perkembangan Dana Alokasi Umum 34 Provinsi Di Indonesia .....	62
<b>BAB V.....</b>	<b>67</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
5.1 Uji Asumsi Klasik .....	67
5.2 Analisis Regresi Panel .....	70
5.3 Pengujian Signifikansi Regresi Data Panel.....	73
5.4 Uji Statistik.....	75
5.5 Pembahasan.....	78
5.5.1 Pengaruh Laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Belanja Modal di Indonesia.....	78
5.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Indonesia.	79
5.5.3 Pengaruh Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Belanja Modal di Indonesia.	80
<b>BAB VI.....</b>	<b>82</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>82</b>
6.1 Kesimpulan .....	82
6.2 Saran.....	83



**DAFTAR PUSTAKA .....84**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menetapkan, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Reformasi pemerintahan yang disertai dengan keterbukaan sudah menjadi tuntutan di Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin menguatnya tuntutan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Hal itulah yang mendorong terjadinya proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut dengan otonomi. Otonomi adalah pendelegasian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi logis, bahwa tiap daerah harus

berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Samad & Iyan, 2013).

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal (Nuarisa, 2013).

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003).

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi

pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan memengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal hal ini dapat dilihat pada lampiran Belanja Modal sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Belanja Modal Menurut 34 provinsi di Indonesia  
2017-2021**

BELANJA MODAL (Y)				
Tahun	Provinsi	Nilai tertinggi	Provinsi	Nilai Terendah
2017	Sulawesi Utara	6147264316.46	Maluku	248391917.45
2018	Sulawesi Utara	6147264316	Kalimantan Selatan	195346 782.10
2019	Sulawesi Utara	7646299871	Kalimantan Selatan	225431207.3
2020	Sulawesi Utara	7386255298	Kalimantan Selatan	218762319.1
2021	Sulawesi Utara	7446448346	Kalimantan Selatan	259436065

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Jika dilihat dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa belanja modal di Indonesia mengalami kenaikan secara terus-menerus. Belanja modal paling tinggi pada tahun 2017 yaitu Sulawesi utara sebesar Rp6147264316.46 dan yang terendah adalah maluku sebesar Rp248391917.45, pada tahun 2018 Belanja modal paling tinggi adalah Sulawesi utara yaitu sebesar Rp8079470326.59 milyar dan yang terendah adalah Kalimantan selatan yaitu sebesar Rp203485723.32 milyar, pada tahun 2019 belanja modal paling tinggi adalah Sulawesi utara yaitu sebesar Rp7646299871.35 milyar dan yang terendah adalah Kalimantan selatan yaitu sebesar Rp225431207.28 juta, pada tahun 2020 belanja modal paling tinggi adalah Sulawesi utara yaitu sebesar Rp7386255298.07 milyar dan yang terendah adalah Kalimantan Selatan yaitu sebesar Rp218762319.14 juta, pada tahun 2021 belanja modal paling tinggi adalah Sulawesi utara yaitu sebesar Rp7446448345.56 milyar dan yang terendah adalah Kalimantan Selatan yaitu sebesar Rp259436065.04 juta.

Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang didirikan dengan peraturan UU No 5 tahun 1962 dengan modal seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan (BPS,2003)

Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan pajak restribusi. BUMD merupakan badan usaha yang didirikan seluruhnya atau sebagian,dengan modal daerah. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD juga merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Bagian laba BUMD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah, setelah dikurangi dengan penyusutan, dan pengurangan lain yang wajar dalam BUMD. Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan berbagai manfaat yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat ekonomi di daerah. Dengan demikian dapat dilihat dari lampiran tabel laba BUMD sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Laba BUMD Menurut 34 Provinsi di Indonesia 2017-2021**

Laba BUMD				
Tahun	Provinsi	Nilai tertinggi	Provinsi	Nilai Terendah
2017	Papua Barat	821.324	DKI Jakarta	399.065
2018	Papua Barat	831.963	DKI Jakarta	422.842
2019	Papua	791.753	DKI Jakarta	523.983
2020	Papua Barat	833.071	DKI Jakarta	541.433
2021	Papua Barat	846.228	DKI Jakarta	636.419

Badan pusat statistik 2023

Dilihat dari tabel 1.2 dibawah menunjukkan Laba BUMD dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 Laba BUMD paling tinggi adalah Papua barat yaitu sebesar Rp821.324 milyar dan yang terendah adalah DKI Jakarta yaitu sebesar Rp399.065 juta, pada tahun 2018 Laba BUMD paling tinggi adalah Papua barat yaitu sebesar Rp831.963 juta dan yang terendah adalah DKI Jakarta yaitu sebesar Rp422.842 juta, pada tahun 2019 Laba BUMD paling tinggi adalah Papua yaitu sebesar Rp791.753 juta dan yang terendah adalah DKI Jakarta yaitu sebesar Rp523.983 juta, pada tahun 2020 Laba BUMD paling tinggi adalah Papua barat yaitu sebesar Rp833.071juta dan yang terendah adalah Jawa barat yaitu sebesar Rp503.488 juta, pada tahun 2021 Laba BUMD paling tinggi adalah Papua barat yaitu sebesar Rp846.228 juta dan yang terendah adalah Jawa barat yaitu sebesar Rp549.651 juta.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras

dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Melihat fenomena yang terjadi, sepertinya alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pertumbuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal masih belum berorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata. Keefer dan Khemani (dalam Halim dan Abdullah, 2006:18) menyatakan bahwa adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat. Padahal menurut Pasal 66 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat”. UU tersebut mengisyaratkan kepada Pemda untuk mengelola keuangan daerah terutama belanja modal secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan konsep multiterm expenditure framework (MTEF) yang disampaikan oleh Allen dan Tommasi (dalam Halim dan Abdullah, 2006:18) yang menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefulness) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (budget capability) dalam pengelolaan



asset tersebut dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa dalam pengelolaan asset terkait dengan belanja pemeliharaan, dan sumber pendapatan hal ini dapat dilihat dari lampiran Dana Alokasi Umum sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Dana Alokasi Umum Menurut 34 Provinsi di Indonesia  
2017-2021**

Dana Alokasi Umum				
Tahun	Provinsi	Nilai tertinggi	Provinsi	Nilai Terendah
2017	Sumatera Barat	1 996 580	Kalimantan Timur	264,328
2018	Sumatera Barat	1 784 401	Kalimantan barat	344,622
2019	Sumatera Barat	1 844 831	Kalimantan utara	294,566
2020	Sumatera Barat	1 965 523	Papua Barat	176,759
2021	Sumatera Barat	2 028 600	Papua Barat	230,531

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Jika dilihat dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum ini Perkembangan Kondisi Dana Alokasi Umu dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 Dana Alokasi Umum paling tinggi adalah Sumatera barat yaitu sebesar Rp1 996 580 milyar dan yang terendah adalah Kalimantan timur yaitu sebesar Rp264,328 milyar, pada tahun 2018 Dana Alokasi Umum daerah paling tinggi adalah Sumatera barat yaitu sebesar Rp1 784 401 milyar dan yang terendah adalah Kalimantan barat yaitu sebesar Rp344,622 milyar, pada tahun 2019 kabupaten kota dengan Dana Alokasi Umum paling tinggi adalah kota Sumatera barat yaitu sebesar Rp1 844 831 milyar dan yang terendah adalah Kalimantan utara yaitu sebesar Rp109,092 milyar, pada tahun 2020 Dana Alokasi Umum paling tinggi adalah Sumatera barat yaitu sebesar Rp1 965 523 milyar dan yang terendah adalah papua barat yaitu sebesar Rp176,759 milyar, pada tahun 2021 Dana Alokasi

Umum paling tinggi adalah Sumatera barat yaitu sebesar Rp2 028 600 milyar dan yang terendah adalah Sulawesi barat yaitu sebesar Rp230,531 milyar.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia hampir selalu merupakan kegiatan ekonomi yang terbesar dalam jumlah, yaitu 99,9% dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 94,7%, meskipun dalam ukuran sumbangan terhadap PDB belum cukup tinggi, yaitu 9,9% sektor ini dapat tetap menjadi tumpuan bagi stabilitas ekonomi nasional sehingga perannya diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia.

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan kegiatan usaha yang memiliki kesempatan usaha yang luas karena berada di berbagai sektor ekonomi baik pertanian maupun non pertanian dan bertujuan untuk meningkatkan investasi, penyerapan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi (Sudiyarti, Ismawati, & Irwansyah, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah Usaha Mikro : Asset Maksimum 50 juta, Omzet Maksimum 300 juta; Usaha Kecil : Asset >50 juta – 500 juta, omzet >300 juta – 2,5 miliar; Usaha Menengah : Asset >500 juta – 10 miliar, omzet >2,5 miliar – 50 miliar (Sudiyarti et al., 2017).

**Tabel 1.4 Jumlah UMKM Menurut 34 Provinsi di Indonesia  
2017-2021**

Jumlah UMKM				
Tahun	Provinsi	Nilai tertinggi	Provinsi	Nilai Terendah
2017	Jawa tengah	836.641	Kalimantan utara	7.103
2018	Jawa tengah	865.215	Kalimantan utara	5.593
2019	Jawa tengah	857.981	Papua Barat	6.645
2020	Jawa tengah	848.414	Papua Barat	5.324
2021	Jawa tengah	850.218	Papua Barat	8.321

Badan pusat statistik 2023

Dilihat dari tabel 1.4 jumlah UMKM di provinsi di Indonesia dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 jumlah UMKM paling tinggi adalah Jawa tengah yaitu sebesar Rp836.641 Unit dan yang terendah adalah Kalimantan utara yaitu sebesar Rp7.103 unit, pada tahun 2018 jumlah UMKM paling tinggi adalah Jawa tengah yaitu sebesar Rp865.215 dan yang terendah adalah Kalimantan utara yaitu sebesar Rp5.593 dan pada tahun 2019 jumlah UMKM paling tinggi adalah Jawa tengah yaitu sebesar Rp857.981 dan yang terendah adalah Papua Barat yaitu sebesar Rp6.645, pada tahun 2020 jumlah UMKM paling tinggi adalah Jawa tengah yaitu sebesar Rp848.414 dan yang terendah adalah Papua Barat yaitu sebesar Rp5.324, pada tahun 2021 jumlah UMKM paling tinggi adalah Jawa tengah yaitu sebesar Rp850.218 dan yang terendah adalah Papua Barat yaitu sebesar Rp8.321 Unit.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh laba BUMD terhadap belanja modal di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah UMKM terhadap belanja modal di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh laba BUMD terhadap belanja modal di indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal di indonesia
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah UMKM terhadap belanja modal di Indonesia

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan tentang pengaruh laba BUMD dana alokasi umum dan jumlah UMKM terhadap belanja modal di Indonesia serta dapat menambah pengalaman di bidang penelitian.
2. Bagi Pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk merencanakan modal belanja untuk Indonesia kedepannya agar lebih teralokasikan dengan baik.
3. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menganalisis laba BUMD dana alokasi umum dan

jumlah UMKM serta dapat menambah pengetahuan mengenai sektor potensi potensi unggulan dari belanja modal di Indonesia.